

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Kemunculan fenomena transnasional menandai perkembangan studi hubungan internasional saat ini. Hal tersebut ditandai dengan keterlibatan aktor non negara, dimana salah satunya dalam menciptakan jaringan yang saling terhubung yang melintasi batas-batas negara. Jepang merupakan salah satu dari sekian negara yang memiliki pergerakan transnasional di dalamnya yaitu masuknya gerakan #MeToo, dimana Jepang merupakan negara di Asia yang dikenal dalam kategori negara maju dalam hal teknologi. Kemajuan teknologi Jepang terlihat pada tahun 1970-an dimana Jepang sudah memiliki robot canggih. Demikian dapat dikatakan bahwa Jepang sudah menjadi negara maju dalam industri teknologi. Disisi lain Jepang yang masuk kedalam golongan negara maju memiliki suatu permasalahan dengan adanya tindakan kriminal, pelecehan seksual, pelecehan kekuasaan dan diskriminasi gender. Terlebih di Jepang terdapat sebuah peribahasa yang berbunyi “ *Onna wa kuni no tairage* “ diartikan bahwa perempuan menjadi aset utama kekuatan suatu negara, dimana perempuanlah yang memegang tanggung jawab dalam memelihara keturunan (Sunarni & Firmansyah, 2020).

Hal ini menjadikan Jepang masuk ke dalam salah satu negara yang tidak ramah untuk perempuan karena pada faktanya perempuan tidak dapat memilih peran karirnya setelah menikah. Disebabkan oleh faktor masyarakat Jepang belum sepenuhnya memahami apa itu gender, sehingga masyarakat memiliki pemahaman bahwa perempuan yang sudah menikah memiliki tanggung jawab dalam memelihara keturunan saja sedangkan laki-laki hanya bertugas untuk bekerja (Sunarni & Firmansyah, 2020). Jepang adalah negara yang memiliki tingkat kesetaraan gender yang rendah ditinjau dari laporan World Economic Forum’s 2018, Jepang ada pada peringkat ke-110 dari 149 negara dalam gender gap report 2018 (Hara, 2018). Berdasarkan data dari

kementrian kehakiman Jepang, tahun 2018 sebanyak 410 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan, kemudian meningkat pada tahun 2019 menyadi sebanyak 445 kasus pelecehan seksual laman Global Voice memberikan informasi yang berasal dari departemen kepolisian Tokyo sebanyak 1.750 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan pada tahun 2017 (Saunders, 2021). Kasus diskriminasi gender di Jepang salah satunya terlihat dari adanya fenomena sosial yaitu *Matahara* “*maternity*” dan “*harassment*”. *Matahara* merujuk pada adanya perlakuan tidak adil terhadap pekerja perempuan yang sedang hamil melahirkan atau pada perempuan pasca melahirkan penyebab utamanya dikarenakan adanya kecemburuan dari para pekerja lain yang terpaksa menggantikan peran selama masa cuti hamil ataupun melahirkan. Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh konfederasi serikat buruh jepang pada tahun 2015 satu dari setiap lima perempuan pekerja di Jepang pernah mengalami *Matahara*, dalam hal ini *Matahara* adalah kekerasan gender yang rentan dialami perempuan di tempat kerja (Kawaguchi, 2019).

*Matahara* sendiri menunjukkan adanya beberapa macam tindakan yang ditujukan kepada perempuan seperti perundungan, pelecehan kekuasaan atau *power harassment* dan merumahkan paksa, yang dilakukan oleh atasan perempuan pekerja, melalui *power harassment* (Iida, 2018). Dengan adanya otoritas di kantor para atasan merasa bahwa ia berhak mengontrol tubuh perempuan termasuk meminta mereka agar menggugurkan kandungan bahkan sama sekali tidak memberikan kelonggaran pekerjaan. Para atasan di kantor memiliki pemikiran bahwa setiap orang harus bekerja secara semaksimal mungkin untuk perusahaan, tak peduli bagaimanapun kondisi pekerjaannya (Wulandari & Elsy, n.d.).

Salah satu alasan mengapa masalah *Matahara* terjadi di Jepang dikarenakan dari adanya peran gender tradisional yang masih melekat bagi masyarakat Jepang dalam artikel Japanese gender role expectations and Attitudes (2019) oleh Melanie Belarmino dan Melinda R. Roberts menyatakan bahwa adanya pondasi pembagian peran masyarakat Jepang didasarkan oleh ide dari ajaran Konfusianisme yang menempatkan peran

tradisional perempuan sebagai ibu dan istri yang memunculkan pemahaman bahwa ini merupakan peran utama kehidupan seorang perempuan (Kawaguchi, 2019).

Selain *matahara* adapun “*Sekuhara*” atau pelecehan seksual, dimana ini merupakan kasus kekerasan gender pada sektor ketenagakerjaan di Jepang. Kasus pelecehan seksual di tempat kerja Sering sekali terjadi khususnya pada perempuan seperti mendapatkan sentuhan tidak senonoh dan tekanan untuk melakukan tindakan seksual, namun banyak sekali korban wanita yang enggan melaporkan karena takut terjadi pemecatan atau dampak negatif yang dapat mengancam karir mereka hal ini terjadi karena adanya peran gender tradisional yang masih melekat dalam masyarakat (Anjelia & Elsy, n.d.).

Kasus *Sekuhara* pada tahun 2014 dialami oleh salah satu anggota parlemen dari partai *minna no To* yaitu Ayaka Shiomura seorang wanita lajang berusia 35 tahun kasus ini diangkat oleh salah satu media berita online yaitu *The Japan Times* yang melaporkan bahwa terjadi pelecehan verbal yang ditujukan kepada Ayaka Shiomura pada saat berlangsungnya penyampaian pidato Ayaka di depan dewan majelis Tokyo Metropolitan, peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 juni 2014. Saat Ayaka Shiomura yang merupakan anggota majelis dari Tokyo Metropolitan partai *Minna no To* yang pada saat itu ia sedang memberikan pidato mengenai permintaannya kepada pemerintahan Tokyo agar dapat memberikan dukungan kepada wanita hamil dan wanita yang sedang membesarkan anak untuk tetap bisa mendapatkan hak bekerjanya namun di sela pidatonya ada beberapa anggota dewan dari kubu *Liberal Democratic Party* (LDP) berkomentar dengan suara lantang dan meneriakkan kalimat “*hayaku kekkonshita hou ga iin janai ka*” “seharusnya anda cepat menikah” dan “*kodomo wo umenai no ka*” “tidak bisa melahirkan anak ya?”. Ujaran kata tersebut merupakan suatu pukulan bagi Ayaka yang pada saat itu sedang memperjuangkan hak wanita Jepang, hal ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi serta pelecehan yang terjadi di tempat kerja (Anjelia & Elsy, n.d.).

Setelah lahirnya kembali gerakan #MeToo di Amerika Serikat, #MeToo kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia termasuk negara-negara di Asia salah satunya Jepang diyakini bahwa #MeToo mulai dikenal di Jepang ketika tahun 2018 akan tetapi sebelum tahun 2018 terdapat sebuah peristiwa yang mendapatkan atensi dari masyarakat Jepang mengenai kasus kejahatan seksual yang menimpa jurnalis Jepang bernama Shiori Ito, ia membagikan peristiwa mengenai, rincian bagaimana seorang jurnalis veteran memperkosanya. Ito menyebutkan pada tanggal 4 April tahun 2015 ia diperkosa oleh seorang jurnalis veteran yang bernama Noriyuki Yamaguchi di salah satu hotel di Tokyo, Yamaguchi merupakan mantan kepala biro Tokyo broadcasting system di Washington DC, sekaligus ia adalah seorang jurnalis yang memiliki hubungan dekat dengan perdana menteri Shinzo Abe, Ito menjelaskan bahwa pada malam itu ia bertemu dengan tuan Yamaguchi untuk mendiskusikan mengenai peluang pekerjaan (Lilja, 2022b). Hal terakhir yang diingat oleh Ito pada malam itu adalah ia merasa pusing saat berada di restoran sushi, saat Ito Shiori menjalani proses kasus pidananya. Ia menyadari bagaimana sistem di Jepang bekerja untuk melemahkan para penyintas kekerasan seksual terlebih ketika penangkapan dibatalkan, dan upaya seakan-akan Ito dibungkam bukan tanpa alasan pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan Ito merupakan seseorang yang memiliki jabatan serta reputasi sehingga, ketika pelaku pelecehan merupakan seseorang yang memiliki kekuasaan yang lebih dalam menutupi kasus yang melibatkan mereka. Ditambah lagi adanya faktor lemahnya penegakan hukum terkait pelecehan seksual di Jepang yang tidak memiliki undang-undang yang pasti dalam mengatasi pelecehan seksual. Tahun 2017 Shiori Ito kembali membuka kasusnya melalui media (Lilja, 2022a).

Ito membagikan pengalamannya di media kemudian setelahnya menimbulkan banyak sekali perspektif dari sebagian masyarakat Jepang khususnya perspektif mengenai perempuan. Yang menyatakan bahwa wanita Jepang asli tidak mungkin akan menceritakan tentang kejadian hal yang memalukan di depan umum, kemudian Ito pun difitnah sebagai seorang

pelacur dan identitas kewarganegaraannya pun dipertanyakan dan ia didesak untuk kembali ke Korea selain itu Ito menambahkan bahwa ia menerima pesan kebencian, email, telepon dari nomor yang tak dikenal dan banyak wanita yang mengkritik bahwa Ito gagal melindungi dirinya sendiri mungkin sulit untuk dipahami, namun akibat dari adanya peran tradisional yang melekat bagi masyarakat di Jepang secara historis, korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang paling disalahkan. Jadi, sebagian besar korban diam dan Shiori Ito adalah pengecualian dalam hal ini (Lilja, 2022b).

Sehingga terkait dengan respon masyarakat Jepang terhadap masuknya gerakan #MeToo pada tahun 2018 menurut Liv Coleman, seorang Associate Professor dalam Ilmu Politik dan studi Internasional yang berspesialisasi di Jepang, berpendapat bahwa gerakan #MeToo yang blak-blakan mendapat penolakan dan ketika korban terkenal seperti Shiori Ito datang menceritakan kasus yang dialaminya kemudian Ito menerima banyak kritik dari perempuan lain. Hal ini menghalangi perempuan lain untuk menceritakan peristiwa pelecehan dan penyerangan seksual yang dialaminya. Dengan cara yang sama, Ito Shiori menyatakan, “Kami belum benar-benar memiliki gerakan #MeToo, dikarenakan banyak korban belum melaporkan peristiwa pelecehan yang dialami. Hal ini dikarenakan masyarakat Jepang ingin mereka diam, meskipun kampanye gerakan #MeToo di Jepang memiliki dampak yang cenderung kurang direspon dengan baik namun Shiori Ito dan gerakan #MeToo berhasil dalam menyadarkan pandangan masyarakat meskipun tetap saja pemikiran tradisional masyarakat Jepang belum bisa sepenuhnya berubah mengenai gender. setidaknya dalam tujuan untuk membawa pada perubahan perilaku masyarakat yang sebelumnya tidak memberikan atensi lebih terhadap isu pelecehan seksual menjadi peduli terhadap isu ini (Lilja, 2022b).

Sampai pada akhirnya Ito Shiori dijuluki sebagai “*the Face of Japan’s #MeToo Movement*“. Karena dengan upaya yang dilakukan Shiori Ito dan dengan munculnya kembali gerakan #MeToo yang mengubah mindset masyarakat terkait keharusan menyuarkan kasus pelecehan dengan

menuntut keadilan bagi korban pelecehan seksual begitu juga dalam lingkungan pekerjaan (Lilja, 2022a). Shiori Ito dan profil #MeToo lainnya di Jepang, berkontribusi dalam menghasilkan narasi baru di Jepang yang menempatkan perempuan tidak hanya berada dalam konteks jaringan kekuasaan dan kekerasan seksual. Narasi yang kini dipertahankan dan dikembangkan oleh gerakan yang terinspirasi dari gerakan #MeToo seperti #WeToo *Japan* (Lilja, 2022a).

Gerakan ini sama halnya dengan gerakan #MeToo yaitu sama-sama berfokus pada kasus pelecehan seksual dengan mendorong negara sebagai pihak ketiga dalam upaya melakukan tindakan memberantas pelecehan seksual. Dikutip dari laman *Mainichi Japan* gerakan ini dibentuk pada tanggal 3 Maret tahun 2018 dalam sebuah pertemuan di Tokyo yang dihadiri oleh Miwa Kato yaitu Direktur Regional UN Women Asia dan Pasifik, kemudian Shiori Ito yang dijuluki sebagai “*The Face of Japan’s #MeToo Movement*” kemudian dihadiri oleh Monica Fukuhara sebagai pencetus kampanye tagar #WeToo, Daisuke Furuta pendiri laman BuzzFeed di Jepang, Sachiko Osawa yang merupakan seorang direktur yayasan dukungan perempuan. Dimana hal ini merupakan bentuk saling keterhubungan antara kelompok sosial, individu dan NGO dalam gerakan transnasional di Jepang. Kemudian pengulangan narasi #MeToo dengan gerakan baru yang bernama Flower demo, dilansir dari laman Kyodo News Flower demo dimulai pada tanggal 11 April 2019 seorang aktivis feminis Minori Kitahara yang terinspirasi oleh gerakan #MeToo sebanyak 500 wanita berkumpul di depan halaman stasiun Tokyo dimana saat itu satu persatu mengambil mikrofon untuk menceritakan hal yang sudah lama dibungkam mengenai kekerasan seksual yang menimpa mereka (Guarini, n.d.).

Gerakan #MeToo mengungkap beberapa mekanisme perlawanan konstruktif. Kebangkitan organisasi-organisasi feminis setelah kampanye #MeToo dapat dipahami sebagai generasi feminis baru di Jepang, yang mengubah wacana feminis Jepang dari sudut pandang baru dan dari posisi subjek baru seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya para aktivis muda

mentransformasi medan politik dengan mengkonstruksi wacana #MeToo menjadi antara lain, wacana #WeToo. Sebagai pengulangan wacana #MeToo yang dilakukan dengan cara sedikit berbeda, dapat dilihat sebagai strategi perlawanan yang konstruktif. Pengulangan, dan bagaimana hal ini dirumuskan, memberikan informasi mengenai isi dan dampak wacana feminis (Murphy, 2019). Gerakan #MeToo di sektor ketenagakerjaan di Jepang menuntut adanya perubahan dalam tata nilai budaya dan struktur kebijakan perusahaan terkait pelecehan seksual. beberapa aspek tuntutan gerakan #MeToo di sektor ketenagakerjaan mencakup beberapa point diantaranya, peningkatan kesadaran, mendorong perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang pelecehan seksual, menyediakan pelatihan untuk mencegahnya, serta menciptakan lingkungan yang mendukung para pekerja yang mengalami pelecehan (Iida, 2018).

Gerakan #MeToo di sektor ketenagakerjaan di Jepang berusaha untuk, mengakhiri impunitas terhadap pelecehan seksual dan pelecehan kekuasaan yang merupakan tindakan yang dilakukan secara kasar oleh atasan terhadap karyawan dimana ini telah menjadi budaya yang menciptakan lingkungan kerja tidak ramah, dimana pelecehan kekuasaan kerap terjadi dan tentunya hal ini merugikan para pekerja serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan setara untuk semua pekerja. Human Right Watch dalam suratnya kepada dewan kebijakan perburuhan Jepang meminta agar pemerintahan Jepang harus mereformasi undang-undang dan kebijakan untuk mengakhiri kekerasan serta pelecehan di tempat kerja, dewan tersebut merupakan sebuah badan penasehat yang terdiri dari perwakilan pekerja dan pengusaha. Pelecehan seksual yang kerap terjadi pada sektor ketenagakerjaan di Jepang menyebabkan media sosial dan protes publik secara besar-besaran. Adapun survei pegawai Kementrian Ketenagakerjaan pada tahun 2017 menemukan sebanyak 32,5% responden pria dan wanita pernah mengalami pelecehan kekuasaan di tempat kerja. Gerakan #MeToo merupakan bentuk perlawanan yang konstruktif, dalam arti menghubungkan orang antara satu

sama lain, menciptakan komunitas yang saling memiliki dan memutuskan siapa yang menjadi korban dan pelaku pelecehan (Lilja, 2022b).

Maka berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis hendak mengamati bagaimana persoalan tindakan pelecehan pada sektor ketenagakerjaan kemudian mengkaji bagaimana upaya advokasi transnasional dalam gerakan #MeToo dan juga penulis hendak meninjau apa saja hambatan dalam upaya jaringan advokasi transnasional melalui gerakan #MeToo dalam sektor ketenagakerjaan di Jepang. Meskipun demikian topik penelitian mengenai #MeToo di Jepang sudah sempat dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Katsumi, Takahiro pada tahun (2018), Mona Lilja (2019) dan Kimura (2015). Akan tetapi belum ada penelitian yang mengulas mengenai topik tersebut di Jepang, Penelitian ini menetapkan Jepang menjadi topik penelitian dikarenakan isu mengenai pelecehan seksual serta diskriminasi di tempat kerja di Jepang terdapat kurangnya atensi lebih dari publik maupun instansi pemerintah. Sehingga penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **“Upaya Advokasi Transnasional melalui #MeToo terhadap perubahan kebijakan Ketenagakerjaan di Jepang”**.

## **1.2 Permusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibuat, Skripsi ini akan membahas serta mengkaji: “Bagaimana perspektif *transnational advocacy networks* memandang gerakan #MeToo dalam perubahan kebijakan Ketenagakerjaan di Jepang?”

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada awal mula perjalanan gerakan #MeToo mulai masuk ke Jepang, mengenai siapa yang pertama kali menyerukan ajakan terkait dengan gerakan #MeToo Jepang serta bagaimana respon dari



masyarakat Jepang dengan masuknya gerakan #MeToo. Dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat Jepang atas kasus pelecehan tergolong sangat rendah, kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan berfokus pada bagaimana gerakan #MeToo dapat berdampak terhadap perubahan kebijakan ketenagakerjaan di Jepang. Penelitian ini memutuskan gerakan #MeToo sebagai pandangan utama pada penelitian dikarenakan gerakan ini dinilai sangat sesuai dengan fokus penelitian dalam Skripsi ini. Penelitian ini berfokus pada tahun 2018 – 2021 ketika awal mula gerakan #MeToo ini muncul dan mulai masuk ke Jepang yang kemudian meningkatkan atensi masyarakat mengenai tindakan pelecehan.

#### **1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengamati persoalan kekerasan seksual pada sektor ketenagakerjaan di Jepang.
2. Untuk mengkaji upaya advokasi transnasional melalui #MeToo dalam sektor ketenagakerjaan di Jepang.
3. Untuk meninjau hambatan upaya jaringan advokasi transnasional melalui gerakan #MeToo dalam sektor ketenagakerjaan di Jepang.

##### **1.4.2 Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi untuk penelitian selanjutnya dan dapat menjadi bahan diskusi dalam representasi gerakan sosial yang berdampak pada kebijakan negara.
2. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.